



KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI TPS INDUK RAJABASA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN FORMULASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN

Atikah Ramadhani¹, Ahmad Rama², Malikh Alya Azzahra³, Annisa Dwi Lestari⁴,
Abdul Halim⁵, Hasan Hariri⁶

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: atikalpg@gmail.com

Abstract. *The delay in waste transportation at the Rajabasa Main Temporary Waste Disposal Site (TPS Induk Rajabasa) in Bandar Lampung has become a significant obstacle to achieving effective and sustainable waste management. This issue has led to waste accumulation, resulting in environmental pollution, public health risks, and declining community trust in public services. This study aims to analyze the factors causing delays in waste transportation, identify the social impacts experienced by surrounding communities, and formulate sustainable waste management policy recommendations. The research employed a qualitative approach with a case study design through field observations, in-depth interviews with waste management personnel and local residents, and analysis of relevant policy documents. The findings reveal that transportation delays are primarily caused by limited transportation fleets, increasing waste volumes, inadequate infrastructure, and weak operational coordination. These conditions have generated various social impacts, including disruptions to daily activities due to unpleasant odors, increased health risks, environmental degradation, and reduced public confidence in local government performance. Based on these findings, the study proposes policy formulations focused on improving transportation capacity, utilizing monitoring technologies, strengthening community participation, implementing circular economy principles, and enhancing coordination among stakeholders. The implementation of these policies is expected to support a more effective, sustainable, and environmentally sound waste management system.*

Keywords: *Waste transportation delay, social impacts, Rajabasa Main Temporary Waste Disposal Site, public policy, sustainable waste management.*

Abstrak. Permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah di TPS Induk Rajabasa, Kota Bandar Lampung, menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan. Keterlambatan tersebut menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta menurunnya kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab keterlambatan pengangkutan sampah, mengidentifikasi dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar, serta merumuskan kebijakan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengelola TPS dan masyarakat sekitar, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengangkutan sampah disebabkan oleh keterbatasan armada, tingginya volume sampah, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi operasional. Dampak yang muncul meliputi gangguan aktivitas masyarakat akibat bau tidak sedap, meningkatnya risiko penyakit, menurunnya kualitas lingkungan, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut, formulasi kebijakan yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas pengangkutan, pemanfaatan teknologi pengawasan, penguatan partisipasi masyarakat, penerapan konsep ekonomi sirkular, dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Kata kunci: Keterlambatan pengangkutan sampah, dampak sosial, TPS Induk Rajabasa, kebijakan publik, pengelolaan persampahan berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Persoalan sampah telah bertransformasi dari sekadar urusan kebersihan lingkungan menjadi masalah nasional yang bersifat multidimensi dan mendesak untuk diselesaikan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi perkotaan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung semakin mengandalkan barang sekali pakai, volume timbulan sampah di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap hari Indonesia menghasilkan lebih dari 140 ribu ton sampah, di mana sekitar 60 persen di antaranya berasal dari kawasan perkotaan. Ironisnya, dari jumlah tersebut hanya sekitar 39 persen yang dapat dikelola secara layak sesuai standar kesehatan dan lingkungan hidup. Sisanya masih menumpuk di titik-titik pengumpulan, dibuang sembarangan di selokan, sungai, lahan kosong, atau bahkan berakhir di laut tanpa melalui proses pengolahan yang tepat.

Sampah tidak lagi dipandang semata sebagai limbah yang harus disingkirkan, melainkan menjadi cermin kualitas pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa (Arifin, M., & Dewi, S. P. (2022)). Masalah ini menyerang berbagai aspek kehidupan secara berkelanjutan: secara ekologis, sampah yang tidak dikelola dengan baik mencemari struktur tanah, merusak kualitas sumber air bersih, dan mengancam. Keanekaragaman hayati; secara kesehatan, menjadi sarang perkembangbiakan hama dan vektor penyakit menular seperti diare, disentri, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan, hingga gangguan kulit yang dapat menyerang seluruh lapisan masyarakat terutama anak-anak; secara sosial, memicu ketidaknyamanan, menimbulkan perselisihan antarwarga, bahkan dapat memicu konflik sosial jika tidak segera ditangani; serta secara ekonomi, menurunkan nilai estetika lingkungan, menghambat perkembangan pariwisata, membebani anggaran negara dan daerah yang harus terus dialokasikan dalam jumlah besar setiap tahunnya, serta berpotensi menimbulkan kerugian materiil akibat banjir yang disebabkan oleh saluran air yang tersumbat sampah (Mahyudin, R. P., & Setiawan, T. (2022)).

Menyadari betapa luasnya dampak yang ditimbulkan, pemerintah telah menetapkan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini terwujud dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut menekankan bahwa pengelolaan sampah harus didasarkan pada prinsip pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, serta penanganan secara terpadu, bertanggung jawab, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah juga telah mencanangkan target nasional untuk mengurangi timbulan sampah hingga 30 persen dan menangani 70 persen sampah secara layak pada tahun 2030 sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.

Namun, semangat dan kerangka hukum yang telah disusun belum sepenuhnya berjalan optimal di lapangan. Kesenjangan antara kebijakan yang ideal dengan pelaksanaan nyata masih menjadi tantangan utama yang dihadapi hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang terus berkembang pesat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, Kota Bandar Lampung saat ini dihuni oleh lebih dari 1,2 juta jiwa dan menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah setiap harinya, dengan laju pertumbuhan sekitar 3-4 persen per tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Sistem pengelolaan sampah di kota ini mengandalkan jaringan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai kelurahan, yang kemudian disatukan di beberapa TPS Induk sebelum akhirnya diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Di antara titik krusial tersebut, TPS Induk Rajabasa memiliki peran yang sangat strategis karena melayani wilayah padat penduduk yang terdiri dari permukiman, pasar tradisional, pertokoan, dan berbagai fasilitas umum. Dalam kondisi ideal, sampah di TPS induk harus segera diangkut menuju TPA agar tidak menumpuk dan menimbulkan masalah. Namun, pengamatan awal menunjukkan bahwa sistem pengangkutan sering kali mengalami hambatan berupa keterlambatan yang berulang dan tidak menentu. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, mulai dari keterbatasan jumlah armada pengangkut, kondisi kendaraan yang sering mengalami kerusakan, ketersediaan bahan bakar, perencanaan rute dan jadwal yang belum efisien, hingga masalah koordinasi antar instansi terkait. Akibatnya, sering terjadi penumpukan sampah selama sehari-hari bahkan berminggu-minggu di area TPS dan sekitarnya. Penumpukan ini menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar: bau tak sedap yang menusuk hingga ke

dalam rumah, populasi lalat, tikus, dan serangga lain yang semakin banyak, pencemaran air tanah dan udara, hingga menurunnya rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Lebih dari sekadar masalah fisik, kondisi ini juga menimbulkan dampak sosial seperti menurunnya. Hubungan harmonis antarwarga, menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kinerja pemerintah daerah, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan biaya tidak sedikit (Nugroho, S., & Wijaya, K. (2023).

KAJIAN TEORITIS

1. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan melalui pendekatan yang terintegrasi mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Menurut Mahyudin dan Setiawan, pengelolaan sampah berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Sistem pengelolaan sampah yang efektif harus mampu menyesuaikan kapasitas pelayanan dengan volume timbulan sampah yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kegagalan pada salah satu tahapan, khususnya pengangkutan sampah, dapat menyebabkan akumulasi sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat (Mahyudin & Setiawan, 2022).

2. Dampak Sosial Lingkungan

Dampak sosial lingkungan merupakan perubahan kondisi sosial masyarakat yang muncul akibat adanya perubahan kualitas lingkungan. Menurut Arifin dan Dewi, penumpukan sampah yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti menurunnya kenyamanan hidup, terganggunya aktivitas masyarakat, meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, serta munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan hanya masalah teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat memicu masalah sosial yang lebih

luas, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Arifin & Dewi, 2022).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Menurut Handayani, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan. Suatu kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam konteks pengelolaan sampah, keterbatasan armada pengangkut, jumlah petugas, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dapat menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan sehingga menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah dan penumpukan sampah di TPS (Handayani, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan memahami secara mendalam permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah di TPS Induk Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Selain mengidentifikasi penyebab utama terjadinya keterlambatan, penelitian ini juga berusaha menggali dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pengelolaan persampahan yang ada (Fitriani, D., & Hidayat, A. (2023). Penelitian dilaksanakan di lingkungan TPS Induk Rajabasa dan wilayah sekitarnya meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyusunan kesimpulan. Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara bertahap, dimulai dari penyeleksian dan pengelompokan informasi agar sesuai dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan data dalam bentuk uraian yang sistematis, hingga penarikan kesimpulan (Hidayat, T., & Prasetyo, B. (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Keterlambatan Pengangkutan Sampah di TPS Induk Rajabasa Bandar Lampung

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah tidak hanya mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir pun dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Ketentuan mengenai pengelolaan sampah telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan sampah terlaksana dengan baik, mulai dari sumber timbulan sampah hingga tempat pemrosesan akhir. Salah satu tahapan yang memiliki peran signifikan dalam sistem tersebut adalah proses pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara menuju tempat pemrosesan akhir. Tahapan pengangkutan menjadi titik kritis yang menentukan kelancaran keseluruhan sistem pengelolaan sampah, kegagalan pada tahap ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026, ditemukan adanya penumpukan sampah di TPS Induk Rajabasa Bandar Lampung. Timbunan sampah terlihat memenuhi sebagian besar area penampungan, belum seluruhnya terangkut menuju tempat pemrosesan akhir. Volume sampah yang tertumpuk terlihat cukup besar, mencakup berbagai jenis sampah rumah tangga, sampah organik, serta material lainnya yang bercampur tanpa pemilahan yang memadai. Kondisi demikian mengindikasikan proses pengangkutan sampah belum berjalan secara optimal, mengakibatkan akumulasi sampah dalam jumlah yang cukup signifikan di lokasi penampungan tersebut. Penumpukan yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara volume sampah yang masuk dengan kapasitas pengangkutan yang tersedia. Kondisi ini berpotensi memperburuk kualitas lingkungan di sekitar TPS apabila tidak segera ditangani secara terstruktur dan menyeluruh.

Keterlambatan pengangkutan sampah dapat dipengaruhi berbagai faktor, yakni keterbatasan sarana dan prasarana, tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya, serta belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat operasional. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, membentuk permasalahan yang bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Handayani (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya, fasilitas pendukung, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pandangan tersebut menegaskan pentingnya keterpaduan antara aspek regulasi, sumber daya manusia, serta kelengkapan infrastruktur dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif. Temuan di TPS Induk Rajabasa sejalan dengan hal tersebut, sejumlah fasilitas pendukung pengelolaan sampah teridentifikasi dalam kondisi kurang layak, memerlukan perhatian lebih lanjut guna menunjang efektivitas pelayanan persampahan. Kondisi fasilitas yang tidak memadai secara langsung berdampak pada kemampuan operasional pengangkutan sampah, memperlambat proses distribusi sampah dari lokasi penampungan menuju tempat pemrosesan akhir.

Kondisi cuaca pada saat observasi berlangsung turut memperlihatkan dampak yang cukup nyata terhadap lingkungan sekitar TPS. Curah hujan yang terjadi menyebabkan aroma sampah semakin menyengat akibat intensifikasi proses dekomposisi pada timbunan sampah yang belum terangkut. Air limpasan dari hujan bercampur dengan cairan lindi yang dihasilkan timbunan sampah, berpotensi mencemari tanah dan air di sekitar lokasi TPS. Bau tidak sedap tetap terdeteksi pada kondisi cuaca normal, mengindikasikan sampah telah terakumulasi dalam jangka waktu yang cukup lama di lokasi penampungan. Akumulasi dalam durasi yang panjang menunjukkan frekuensi pengangkutan yang tidak sesuai dengan laju timbunan sampah yang terjadi setiap harinya. Kondisi ini menimbulkan pencemaran lingkungan berupa polusi udara yang mengganggu kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat di sekitar TPS Induk Rajabasa.

Temuan lapangan tersebut menunjukkan keterlambatan pengangkutan sampah di TPS Induk Rajabasa tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengangkutan semata, berimplikasi pula pada kesiapan sarana pendukung dan efektivitas

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup perbaikan pada aspek teknis, kelembagaan, serta kebijakan secara bersamaan. Diperlukan upaya perbaikan sistem pengangkutan secara terstruktur serta peningkatan kualitas fasilitas persampahan yang memadai, guna meminimalkan terjadinya penumpukan sampah secara berkelanjutan. Peningkatan frekuensi dan kapasitas pengangkutan perlu disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi armada, jadwal operasional, serta mekanisme koordinasi antarunit pelayanan. Keseluruhan upaya tersebut harus didukung komitmen penuh dari pemangku kebijakan agar pengelolaan sampah di TPS Induk Rajabasa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dampak Sosial Keterlambatan Pengangkutan Sampah terhadap Masyarakat

Keberadaan TPS Induk Rajabasa di tengah kawasan permukiman menjadikan masyarakat sekitar sebagai pihak yang paling merasakan dampak langsung dari permasalahan pengelolaan sampah yang tidak optimal. Jarak antara lokasi penampungan dengan kawasan hunian warga menciptakan ruang interaksi yang tidak dapat dihindari, masyarakat terpaksa hidup berdampingan dengan kondisi lingkungan yang jauh dari standar kelayakan. Menurut Maharani (2025), keberadaan timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak sosial yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan kenyamanan hingga menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal. Kedekatan geografis antara TPS dengan permukiman warga menjadi faktor utama yang memperbesar intensitas dampak sosial yang dialami masyarakat sekitar. Situasi ini menempatkan warga dalam posisi yang rentan, tanpa kemampuan memilih untuk menghindar dari dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan pengelolaan sampah tersebut.

Salah satu dampak sosial yang paling nyata dirasakan warga adalah terganggunya aktivitas keseharian akibat pencemaran udara dari timbunan sampah. Bau tidak sedap yang menyebar ke kawasan permukiman memaksa warga membatasi aktivitas di luar rumah, termasuk kegiatan bermain anak-anak dan interaksi sosial antarwarga di

ruang terbuka. Pembatasan aktivitas sosial ini secara perlahan mengubah pola interaksi masyarakat, ruang publik yang seharusnya menjadi sarana bersosialisasi berubah menjadi area yang dihindari warga. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan ikatan sosial antarwarga, menurunkan intensitas komunikasi dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Tekanan yang dialami secara kolektif oleh warga menciptakan ketidaknyamanan sosial yang bersumber dari satu permasalahan yang sama, yakni ketidakmampuan sistem pengangkutan sampah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan lingkungan yang bersih.

Pada dimensi kesehatan, masyarakat yang bermukim di sekitar TPS menghadapi ancaman yang bersumber dari proliferasi vektor penyakit akibat penumpukan sampah yang berkepanjangan. Lalat, nyamuk, dan tikus yang berkembang biak pada timbunan sampah bergerak bebas menuju kawasan permukiman, membawa potensi penularan penyakit berbasis lingkungan yang tidak dapat diremehkan. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap ancaman ini adalah anak-anak usia dini dan lansia, daya tahan tubuh keduanya belum atau tidak lagi mampu memberikan respons imun yang optimal. Gangguan kesehatan yang dialami warga secara berulang akibat kondisi lingkungan yang buruk berdampak pada penurunan produktivitas sehari-hari, termasuk absennya anak dari sekolah dan berkurangnya jam kerja orang dewasa. Beban ekonomi rumah tangga pun ikut terpengaruh, biaya pengeluaran untuk keperluan kesehatan meningkat seiring dengan memburuknya kondisi sanitasi lingkungan sekitar TPS.

Dampak sosial yang tidak kalah signifikan adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang layak. Ketidakmampuan sistem pengangkutan sampah dalam mengimbangi laju timbulan sampah dibaca oleh warga sebagai bentuk kelalaian yang merugikan masyarakat secara kolektif. Silolongan (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat memunculkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Rasa kecewa yang terakumulasi dalam jangka panjang berpotensi mendorong warga untuk bersikap apatis terhadap program kebersihan lingkungan yang digagas pemerintah. Partisipasi warga yang menurun justru memperlemah ekosistem pengelolaan sampah

secara keseluruhan, menciptakan lingkaran permasalahan yang semakin sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang serius dan terencana.

Dampak-dampak sosial yang teridentifikasi di atas memperlihatkan bahwa permasalahan di TPS Induk Rajabasa telah melampaui batas persoalan teknis dan menyentuh sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Gangguan terhadap aktivitas keseharian, ancaman kesehatan pada kelompok rentan, melemahnya ikatan sosial, serta menurunnya kepercayaan publik merupakan rangkaian dampak yang tumbuh dari satu akar permasalahan yang sama. Kondisi ini menegaskan perlunya pergeseran perspektif dalam memandang persoalan pengangkutan sampah, tidak lagi sekadar urusan operasional teknis, melainkan sebagai isu sosial yang menyangkut hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan layak huni. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab yang tidak dapat ditunda oleh pemangku kebijakan di tingkat daerah.

C. Analisis Hasil Wawancara Masyarakat di Sekitar TPS Rajabasa

Hasil wawancara dengan masyarakat yang bermukim di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Rajabasa menunjukkan bahwa keberadaan TPS memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan lingkungan tempat tinggal warga. Keluhan utama yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan aroma tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah, terutama setelah terjadi hujan. Kondisi tersebut disebabkan oleh proses pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas seperti amonia dan hidrogen sulfida sehingga menimbulkan bau menyengat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Natalina (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Rajabasa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan luas TPS, jumlah tenaga kerja, armada pengangkutan, serta pengelolaan operasional yang belum optimal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Selain masalah bau, masyarakat juga mengungkapkan bahwa penumpukan sampah sering terjadi ketika memasuki masa libur hari besar. Pada periode tersebut, aktivitas pengangkutan sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami penurunan karena terbatasnya petugas yang bertugas.

Akibatnya, volume sampah yang masuk ke TPS terus bertambah, sedangkan proses pemindahan ke TPA tidak berjalan secara maksimal. Penumpukan ini menyebabkan kapasitas TPS menjadi tidak memadai dan memperburuk kondisi lingkungan sekitar. Penumpukan sampah yang berlangsung dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko berkembangnya vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan kecoa. Selain itu, timbunan sampah yang terkena air hujan berpotensi menghasilkan lindi yang dapat mencemari tanah maupun saluran drainase di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan frekuensi pengangkutan sampah, penambahan tenaga operasional, serta penerapan sistem pengelolaan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sistem pengangkutan sampah. Ketika jadwal pengangkutan terganggu, akumulasi sampah langsung terjadi dalam waktu singkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan persampahan belum didukung oleh sistem cadangan atau mekanisme pelayanan yang tetap berjalan selama hari libur nasional. Padahal, produksi sampah rumah tangga cenderung meningkat pada saat perayaan hari besar karena meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Yang tetap berjalan selama periode libur untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah yang berlebihan.

D. Analisis Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Bandar Lampung

Pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan diperkuat dengan berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah (Huda & Natalina 2022). Kebijakan tersebut telah mengakomodasi prinsip pengelolaan sampah modern melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Kholid dkk 2025). Pemerintah

Kota Bandar Lampung juga mengembangkan program TPS 3R dan bank sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan persampahan. Penelitian mengenai pengelolaan persampahan di Kecamatan Rajabasa menunjukkan bahwa aspek operasional, kelembagaan, pembiayaan, hukum, dan partisipasi masyarakat belum berjalan secara optimal. Keterbatasan jumlah armada pengangkut, tenaga kerja, dan fasilitas TPS menyebabkan pelayanan persampahan belum mampu mengimbangi peningkatan volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

Permasalahan lain yang masih menjadi tantangan adalah tingginya jumlah timbulan sampah Kota Bandar Lampung. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus bertambah setiap tahun. Sementara itu, kapasitas pengelolaan yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Beberapa penelitian bahkan mencatat bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih memerlukan inovasi teknologi dan peningkatan infrastruktur agar mampu mengurangi beban TPA secara signifikan.

E. Formulasi Kebijakan Publik Pengelolaan Persampahan Berkelanjutan

Permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah di TPS Induk Rajabasa menunjukkan bahwa sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek infrastruktur, manajemen operasional, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penanganan sampah setelah menumpuk, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui penguatan tata kelola, partisipasi publik, dan pendekatan ekonomi sirkular. Konsep pengelolaan sampah berkelanjutan menekankan bahwa sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses *reduce, reuse, dan recycle* (3R) (Anggraeni, 2025).

Kebijakan pertama yang dapat dirumuskan adalah peningkatan kapasitas dan efektivitas sistem pengangkutan sampah. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan evaluasi terhadap jumlah armada, kondisi kendaraan operasional, serta pola distribusi pengangkutan dari TPS menuju TPA. Keterlambatan pengangkutan sering kali disebabkan oleh keterbatasan sarana dan tidak seimbangnya volume sampah dengan kapasitas pengangkutan. Oleh karena itu, penambahan armada, peremajaan kendaraan yang tidak layak pakai, serta penetapan jadwal pengangkutan yang lebih teratur perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan persampahan daerah.

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pemantauan armada secara digital dan layanan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, dapat membantu pemerintah mendeteksi keterlambatan pengangkutan secara cepat dan meningkatkan respons terhadap keluhan warga. Penguatan sistem pengawasan juga penting untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Kebijakan berikutnya adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penghasil sampah. Edukasi mengenai pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pengembangan program bank sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat terbukti mampu mendukung terciptanya sistem ekonomi sirkular yang berorientasi pada pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi (Edinov et al., 2025).

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular ke dalam kebijakan persampahan. Pendekatan ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem linear yang hanya berorientasi pada produksi, konsumsi, dan pembuangan sampah. Melalui pendekatan ini, sampah dapat

diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti kompos, bahan daur ulang, maupun sumber energi alternatif. Implementasi ekonomi sirkular juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban sampah yang harus diangkut ke TPA (Yuniar et al., 2025).

Di samping itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPS, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi. Lemahnya koordinasi sering kali menjadi faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, forum evaluasi rutin dan sistem pelaporan yang jelas perlu dibentuk untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat (Hanif & Akmara, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, formulasi kebijakan pengelolaan persampahan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung perlu diarahkan pada lima aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas pengangkutan sampah, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, penguatan partisipasi masyarakat, penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah di TPS Induk Rajabasa sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN

Keterlambatan pengangkutan sampah di TPS Induk Rajabasa Bandar Lampung menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek sarana dan prasarana, kapasitas pengangkutan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang melebihi kapasitas tampung TPS, terutama pada periode tertentu seperti musim hujan dan hari libur, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau tidak sedap, potensi pencemaran tanah dan air akibat lindi, serta meningkatnya risiko berkembangnya vektor penyakit. Hasil observasi dan wawancara masyarakat menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi

juga berdampak pada aspek sosial, seperti terganggunya aktivitas sehari-hari, menurunnya kenyamanan hidup, meningkatnya ancaman kesehatan masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah dalam bidang persampahan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan formulasi kebijakan pengelolaan persampahan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan melalui penguatan sistem pengangkutan, pemanfaatan teknologi pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, penerapan konsep ekonomi sirkular, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan penambahan armada dan tenaga operasional, perbaikan jadwal pengangkutan yang lebih efektif, pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi, serta edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah di TPS Induk Rajabasa diharapkan dapat diatasi secara optimal sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif, berwawasan lingkungan, dan mampu menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, M. (2025). Analisis tematik kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipatif menuju ekonomi sirkular di Kota Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 309–322.
- Edinov, S., Egim, A. S., Efrina, G., Fauzi, A., & Desabta, G. (2025). Analisis pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam mendukung ekonomi sirkular dengan pendekatan loop dynamics menuju cita pembangunan berkelanjutan. *Journal of Science and Social Research*, 9(1).
- Hanif, S. N., & Akmara, R. G. (2025). Green policy untuk pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*.
- Irtanti, M. D., Rukisna, L., & Taryono. (2026). Kebijakan pengelolaan sampah plastik sebagai solusi pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan. *Proficio*, 7(1).
- Yuniar, I., Syamsiyah, N., & Yunarti, Y. (2025). Analisis kebijakan ekonomi sirkular sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 69–80.
- Huda, M. M., & Natalina. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pengelolaan Persampahan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. *Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya*.
- Kholid, M. W., Zuhriani, & Ikhwan, A. (2025). Implementasi Kebijakan TPS 3R Dalam Pengelolaan Sampah Daerah di Kota Bandar Lampung. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*.

- Handayani, N. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*.
- Maharani, H. S. (2025). *Dampak Sosial Timbunan Sampah terhadap Kehidupan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Silolongan, R. F. (2019). Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kritis*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Arifin, M., & Dewi, S. P. (2022). Dampak Penumpukan Sampah di Tempat Pembuangan Sementara terhadap Kesehatan dan Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 11(2), 89-97.
- Fitriani, D., & Hidayat, A. (2023). Evaluasi Sistem Pengangkutan Sampah di Kota Bandar Lampung: Studi Kasus TPS Induk Rajabasa. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 18(1), 45-58.
- Hidayat, T., & Prasetyo, B. (2024). Faktor Penyebab Keterlambatan Pengangkutan Sampah di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 112-125.
- Mahyudin, R. P., & Setiawan, T. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Daerah Perkotaan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 7(2), 34-49.
- Nugroho, S., & Wijaya, K. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tempat Pembuangan Sementara Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 78-92.
- Arifin, M., & Dewi, S. P. (2022). Dampak penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 11(2), 89-97.
- Handayani, N. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*.
- Mahyudin, R. P., & Setiawan, T. (2022). Strategi pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah perkotaan: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 7(2), 34-49.